

BAB III KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan kembali RTRWK lebih mudah ditindaklanjuti dengan membuat dan mengikuti suatu tipologi peninjauan kembali. Adapun kriteria-kriteria yang membentuk tipologi tersebut adalah:

1. Kelengkapan dan keabsahan data;
2. Relevansi metoda dan hasil analisis;
3. Kesesuaian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
4. Prosedur penyusunan RTRWK;
5. Kesahan produk RTRWK.

3.1 KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DATA

Data dikatakan lengkap jika minimal terdapat:

- a. Data Kebijakan Pembangunan Daerah (sasaran dan tujuan) dan Data Regional:
 - Data kesimpulan arahan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Propinsi terhadap Kabupaten.
 - Data kesimpulan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Kabupaten.
 - Data kebijakan pembangunan sektor lainnya yang berpengaruh.

- Data atau informasi arahan RTRWN, RTR Pulau atau Perwilayahan, RTRWP terhadap Kabupaten.
- b. Data karakteristik ekonomi wilayah dan perkembangannya, yang meliputi:
- Data PDRB Kabupaten (time series 5 tahun)
 - Data mobilitas orang dan barang di kabupaten.
 - Data sistem jaringan transportasi jalan.
 - Data produksi per sektor pembangunan total kabupaten.
 - Data produksi per sektor pembangunan dirinci per kecamatan.
 - Data APBD Kabupaten (time series 5 tahun)
 - Data realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin.
 - Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pembangunan.
 - Data investasi pembangunan per sektor yang terkait dengan penataan ruang.
- c. Data dan kondisi perkembangan kependudukan / demografi, yang meliputi:
- Data jumlah penduduk kabupaten, kecamatan, kota-kota (perkotaan), dan perdesaan.
 - Data kepadatan penduduk kabupaten, kecamatan dan kota.

- Data rate pertumbuhan kabupaten, kecamatan, desa.
 - Data lapangan pekerjaan penduduk kabupaten, dirinci per kecamatan.
- d. Data sumber daya buatan, meliputi:
- Data sarana ekonomi tiap kecamatan dan perkotaan.
 - Data sarana sosial tiap kecamatan dan perkotaan.
 - Data dan peta sarana dan prasarana transportasi di kabupaten.
 - Data dan peta prasarana pengairan.
 - Data dan peta sumber air baku.
 - Data dan peta sistem jaringan listrik.
 - Data dan peta sistem telekomunikasi.
- e. Data sumber daya alam, meliputi:
- Data dan peta penggunaan lahan/tanah
 - Data dan peta hidrologi/sumberdaya air
 - Data dan peta topografi dan morfologi
 - Data dan peta geologi dan jenis tanah
 - Data dan peta sumberdaya mineral
 - Data dan peta unsur-unsur iklim
 - Data dan peta kehutanan
 - Data dan peta kawasan rawan bencana

Peta dibuat dengan kedalaman skala 1:100.000 sampai dengan 1:50.000.

3.2 METODE DAN HASIL ANALISIS

Metoda dan hasil analisis yang telah digunakan dalam penyusunan RTRWK dianggap lengkap jika minimal terdapat:

- a. Analisis untuk melihat kedudukan Kabupaten dalam sistem perwilayahan nasional, sistem tata ruang pulau, sistem perwilayahan propinsi, dan keterkaitannya dengan kabupaten lainnya. Analisis ini dinyatakan lengkap jika minimal memiliki :
 - Analisis mengenai jaringan transportasi nasional, pulau, propinsi
 - Analisis mengenai arahan kebijakan RTRWN, RTR Pulau, Perwilayahan, RTRWP, dan kebijaksanaan sektoral.
 - Analisis sistem perkotaan, regional yang berpengaruh terhadap kabupaten.
 - Analisis fungsi dan peranan kabupaten dalam lingkup nasional, pulau, propinsi dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan nasional/ regional secara umum.
 - Analisis sektor-sektor unggulan yang menjadi *prime mover* di kabupaten, propinsi, pulau maupun nasional.
- b. Analisis Demografi
 - Analisis tingkat perkembangan penduduk
 - Analisis mengenai pergerakan/mobilitas penduduk antar kabupaten dan dalam kabupaten

- Analisis distribusi/kepadatan penduduk kecamatan, perkotaan, dan perdesaan
 - Analisis struktur pekerjaan penduduk kecamatan, perkotaan dan perdesaan
 - Analisis struktur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja per kecamatan, perkotaan dan perdesaan.
- c. Analisis Sosial Kemasyarakatan
- Analisis adat-istiadat yang menghambat dan mendukung pembangunan
 - Analisis tingkat partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembangunan
 - Analisis kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
 - Analisis pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat
 - Analisis kinerja tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial
- d. Analisis Ekonomi
- Analisis mengenai ekonomi dasar
 - Analisis mengenai struktur ekonomi wilayah kabupaten
 - Analisis mengenai peluang pertumbuhan ekonomi
 - Analisis pergerakan barang dan jasa intra dan inter wilayah
 - Analisis pola persebaran ekonomi dalam wilayah

- Analisis mengenai potensi investasi.
- e. Analisis Fisik dan Daya Dukung Lingkungan
- Analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor, dll)
 - Analisis lokasi dan kapasitas sumber daya alam
 - Analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung maupun budidaya.
- f. Analisis Sarana dan Prasarana
- Analisis kondisi, jenis dan jumlah sarana sosial dan ekonomi.
 - Analisis sarana dan prasarana transportasi
 - Analisis sarana dan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
- g. Analisis struktur dan pola ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya.
- Analisis ini dinyatakan lengkap apabila dapat dirangkum faktor-faktor pembentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang dari kesimpulan analisis pola sebaran penduduk, pola sebaran kegiatan pembangunan (kegiatan budidaya), dan pola sebaran jaringan sarana-prasarana.
- h. Analisis potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia
- Potensi sumber daya alam yang ada, kemungkinan dan keterbatasan pengembangannya.
 - Potensi pengembangan sumber daya buatan

- Kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk mengelola sumber-sumber di atas.
- i. Analisis Keuangan dan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah
- Analisis mengenai jumlah dan proporsi pembiayaan pembangunan kabupaten serta arahan dari tingkat propinsi.
 - Analisis PAD, subsidi pemerintah pusat, dan subsidi dari tingkat propinsi.
 - Analisis sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dsb).

3.3 PERUMUSAN KONSEP DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian-bagian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan yang diperiksa kesesuaiannya meliputi:

- a. Perumusan tujuan pemanfaatan ruang
- b. Perumusan masalah pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan masalah pemanfaatan ruang
- c. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
- d. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah berikut :
 - Strategi pengelolaan kawasan kawasan lindung dan budidaya

- Strategi pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu.
- Strategi pengembangan sistem kegiatan pembangunan serta sistem permukiman perdesaan dan perkotaan.
- Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- Strategi pengembangan kawasan prioritas
- Strategi pemanfaatan ruang.
- Strategi pengendalian pemanfaatan ruang,

3.4 KESAHAN PRODUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

RTRW Kabupaten dinyatakan sah sesuai UUPR, apabila memiliki:

- Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten serta konsep dan strategi pengembangannya untuk mencapai tujuan tersebut di atas.
- Rencana struktur pemanfaatan ruang :
 - a. Rencana sistem kegiatan pembangunan
 - b. Rencana sistem permukiman perkotaan dan perdesaan
 - c. Rencana sistem prasarana wilayah yang terdiri dari :
 - i) Rencana sistem prasarana transportasi
 - ii) Rencana sistem prasarana energi/listrik

- iii) Rencana sistem prasarana pengelolaan
 - iv) Rencana sistem prasarana lingkungan
 - v) Rencana sistem prasarana lainnya
- Rencana pola pemanfaatan ruang.

3.5 PROSEDUR PENYUSUNAN RTRWK

Penyusunan RTRWK umumnya mengikuti prosedur yang berciri sebagai berikut:

- Disusun berdasarkan pedoman penyusunan yang berlaku
- Melibatkan seluruh tim koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten bersangkutan serta masyarakat dan pakar termasuk swasta
- Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dari semua pihak dan mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi.